



Nomor : PHN-KP.06.02-03
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

4 Desember 2018

Yth. Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum
di –
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Penyuluh Hukum, bersama ini kami sampaikan daftar pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang telah lulus seleksi administrasi dan mendapatkan rekomendasi pimpinan unit kerja yang bersangkutan (daftar peserta terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon Saudara dapat menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti uji kompetensi dimaksud, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Desember 2018
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul Cinere No. 4 Cinere Depok
Pakaian : Kemeja lengan panjang warna putih dan celana/rok warna hitam

Setiap peserta yang akan mengikuti uji kompetensi mengisi **Form Unjuk Kerja** beserta seluruh bukti pendukung, dikirim ke Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui email penyuluhhukum.bphn@gmail.com paling lambat tanggal 14 Desember 2018, dan diserahkan pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Para peserta diharapkan membawa laptop masing-masing.

Biaya transportasi dan akomodasi selama acara berlangsung ditanggung oleh peserta atau instansi pengusul. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Edi (081289669866) dan Sdr. Teguh Ariyadi (081389834090).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,




Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP.19620410 198703 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;
3. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

Nomor : PHN-KP.06.02-03

Tanggal : 4 Desember 2018

DAFTAR PESERA UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	JABATAN	UNIT KERJA
1	Drs. Abdullah, S.H. 195904061980121002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Jawardi, S.H., M.H. 196207071991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Badan Pembinaan Hukum Nasional
3	Das Enlailatul Husna, S.H. 196404091991032001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Badan Pembinaan Hukum Nasional
4	Ivo Hetty Novita Nainggolan, S.H., M.H. 197702212003122002	Penata Tk. I(III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Badan Pembinaan Hukum Nasional
5	Zabidin, S.H., M.H. 197207051994031003	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
6	Chandra Weli, S.H. 197408102002121001	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
7	Serli Randabunga, S.H., M.H. 197103301994032001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
8	Haryanto, S.H. 196106091994031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
9	Suwarno, S.H. 196112301985031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
10	Dra. Indri Astuti 196405151991032001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
11	Ngadiya, S.H. 196306181989031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
12	Karmi, S.H. 196503291989032006	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
13	Imelda Milu Kemalasar, S.H. 197705022001122001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
14	Ratih Rosmayuani, S.Sos., M.H. 196706142003122001	Penata (III/c)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali
15	Retno Supriastutik, S.H. 196807161993032002	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	BPS
16	Diana Siska, S.H. 198401282002122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
17	Kadek De Adyana, S.H. 198112142002121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali
18	Bayu Sulistomo, S.H. 198201112011011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	BPS



LAMPIRAN II

Nomor : PHN-KP.06.02-03

Tanggal : 4 Desember 2018

PETUNJUK PENGISIAN FORM UNJUK KERJA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

DEFINISI FORM UNJUK KERJA PENYULUH HUKUM

Form unjuk kerja penyuluh hukum merupakan laporan kegiatan penyuluh hukum dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum, yang meliputi bukti fisik (dokumen, gambar, dan lain sebagainya) yang menggambarkan pengalaman kerja sebagai penyuluh hukum sesuai jenjang jabatannya.

ISI FORM UNJUK KERJA PENYULUH HUKUM

Form unjuk kerja meliputi:

I. IDENTITAS

A. Data Diri

1. Nama : Tuliskan nama lengkap beserta gelar
2. NIP : Tuliskan NIP
3. Tempat & tanggal lahir : Tuliskan nama kota/ kabupaten serta tanggal, bulan dan tahun lahir
4. Jabatan : Tuliskan jabatan saat ini
5. Unit Kerja : Tuliskan Unit Kerja Eselon II dan I
6. Kementerian/LPNK/Pemprov : Tuliskan
/ Pemkab/Kota Kementerian/LPNK/Pemprov/Pemkab/Kota
Alamat tempat kerja/ kantor Tuliskan nama jalan dan nomor, kota Kec. Dan Kabupaten, Provinsi, No Kode Pos tempat kerja saat ini
7. Telp kantor : Tuliskan nomor telepon kantor beserta kode area
8. Telp & Email Pribadi : Tuliskan nomor telepon dan email pribadi saudara

B. Riwayat Pendidikan

Tuliskan nama riwayat pendidikan mulai dari jenjang SMA/SMU sampai dengan pendidikan saat ini. Lampirkan bukti pendukung, misal, copy ijazah.

C. Riwayat Pekerjaan

Tuliskan riwayat pekerjaan atau nama jabatan dengan keterangan tahun.

II. CAPAIAN KERJA

Tuliskan capaian kerja yang pernah dilaksanakan dalam jabatan saat ini sesuai wilayah kerja, berdasar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Hukum, meliputi :

1. Penyuluh Hukum Pertama
 - a. Mengumpulkan dan mengolah peta penyuluhan hukum
 - b. Menyusun program penyuluhan hukum
 - c. Menyusun materi penyuluhan hukum
 - d. Membuat dan menggunakan media penyuluhan hukum
 - e. Menerapkan metode penyuluhan hukum
 - f. Menumbuhkembangkan kadarkum/desa sadar hukum
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum

2. Penyuluh Hukum Muda
 - a. Mengumpulkan dan mengolah peta penyuluhan hukum
 - b. Menyusun program penyuluhan hukum
 - c. Menyusun materi penyuluhan hukum
 - d. Membuat dan menggunakan media penyuluhan hukum
 - e. Menerapkan metode penyuluhan hukum
 - f. Menumbuhkembangkan kadarkum/desa sadar hukum
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum
 - h. Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan hukum
3. Penyuluh Hukum Madya
 - a. Mengumpulkan dan mengolah peta penyuluhan hukum
 - b. Menyusun program penyuluhan hukum
 - c. Menyusun materi penyuluhan hukum
 - d. Menumbuhkembangkan kadarkum/desa sadar hukum
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum
 - f. Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan hukum
 - g. Mengembangkan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan hukum
 - h. Melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluh hukum

III. LAMPIRAN

Lampirkan seluruh bukti pendukung yang telah saudara tuliskan dalam form unjuk kerja.

**FORM UNJUK KERJA
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM**



I. IDENTITAS

A. Data Diri

- 1 Nama :
- 2 NIP :
- 3 Tempat & tanggal lahir :
- 4 Jabatan :
- 5 Unit Kerja :
- 6 Alamat tempat kerja/ kantor :
- 7 Telp kantor :
- 8 Telp & Email Pribadi :

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Bidang/ Jurusan	Gelar	Tempat/ Kota	Tahun Lulus

*Bukti ijazah terakhir dilampirkan dalam lampiran.

C. Riwayat Pekerjaan

Nama Jabatan	Unit Kerja	Tahun

*Bukti SK jabatan terakhir dilampirkan dalam lampiran.

II. CAPAIAN KERJA

A. CAPAIAN KERJA PENYULUH PERTAMA

Unit Kompetensi	Kompetensi Inti	Kelengkapan Bukti		
		Bukti Pendukung	Ada	Tidak Ada
PETA PENYULUHAN HUKUM	Mampu memahami menelusuri dan mengumpulkan serta mengolah peta penyuluhan hukum tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan (memuat demografi, permasalahan hukum yang ada, media yang tersedia, segmentasi audiens/komunitas yang ada, tingkat pendidikan, agama)	Naskah		
PROGRAM PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta merencanakan dan menyusun program penyuluhan hukum di tingkat	Naskah		

	desa/kelurahan, dan kecamatan (jenis kegiatan penyuluhan, target penyuluhan, jumlah kegiatan penyuluhan)			
MATERI PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan hukum untuk tingkat desa/kelurahan, dan kecamatan (peraturan perundang-undangan)	Naskah		
MEDIA PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta membuat dan menggunakan media penyuluhan hukum tingkat desa/kelurahan, dan kecamatan (jenis media)	Naskah/ Laporan		
METODE PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta menyiapkan dan menerapkan metode penyuluhan hukum untuk tingkat desa/kelurahan, dan kecamatan (jenis metode penyuluhan hukum)	Naskah/ Laporan		
KADARKUM/DESA SADAR HUKUM	Mampu dan memahami serta menumbuh kembangkan kadarkum/desa sadar hukum dilingkungan komunitas desa/kelurahan dan kecamatan	Laporan		
EVALUASI PELAKSANAAN PENYULUH HUKUM	Mampu dan memahami evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan hukum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Laporan		

B. CAPAIAN KERJA PENYULUH MUDA

Unit Kompetensi	Kompetensi Inti	Kelengkapan Bukti		
		Bukti Pendukung	Ada	Tidak Ada
PETA PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta menelusuri dan mengumpulkan serta mengolah peta penyuluhan hukum tingkat kabupaten/kota (memuat demografi, permasalahan hukum yang ada, media yang tersedia, segmentasi audiens/komunitas yang ada, tingkat pendidikan, agama)	Naskah		

PROGRAM PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta merencanakan dan menyusun program penyuluhan hukum di tingkat kabupaten/kota (jenis kegiatan penyuluhan, target penyuluhan, jumlah kegiatan penyuluhan)	Naskah		
MATERI PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan hukum untuk tingkat kabupaten/kota (peraturan perundang-undangan)	Naskah		
MEDIA PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta membuat dan menggunakan media penyuluhan hukum tingkat kabupaten/kota (jenis media)	Naskah/ Laporan		
METODE PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta menyiapkan dan menerapkan metode penyuluhan hukum untuk tingkat kabupaten/kota (jenis metode penyuluhan hukum)	Naskah/ Laporan		
KADARKUM/DESA SADAR HUKUM	Mampu dan memahami serta menumbuhkan kembangkan kadarkum/desa sadar hukum di lingkungan komunitas kabupaten/kota	Laporan		
EVALUASI PELAKSANAAN PENYULUH HUKUM	Mampu dan memahami serta mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan hukum di tingkat kabupaten/kota	Laporan		
EVALUASI DAMPAK PELAKSANAAN PENYULUH HUKUM	Mampu dan memahami serta mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan hukum di tingkat kabupaten/kota	Laporan		

C. CAPAIAN KERJA PENYULUH MADYA

Unit Kompetensi	Kompetensi Inti	Kelengkapan Bukti		
		Bukti Pendukung	Ada	Tidak Ada
PETA PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami, menelusuri dan mengumpulkan serta mengolah peta	Naskah		

	penyuluhan hukum tingkat provinsi (memuat demografi, permasalahan hukum yang ada, media yang tersedia, segmentasi audiens/komunitas yang ada, tingkat pendidikan, agama)			
PROGRAM PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta merencanakan dan menyusun program penyuluhan hukum di tingkat provinsi (jenis kegiatan penyuluhan, target penyuluhan, jumlah kegiatan penyuluhan)	Naskah		
MATERI PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan hukum untuk tingkat provinsi (peraturan perundang-undangan)	Naskah		
KADARKUM/DESA SADAR HUKUM	Mampu dan memahami serta menumbuh kembangkan kadarkum/desa sadar hukum di tingkat provinsi	Laporan		
EVALUASI PELAKSANAAN PENYULUH HUKUM	Mampu dan memahami serta mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan hukum di tingkat provinsi	Laporan		
EVALUASI DAMPAK PELAKSANAAN PENYULUH HUKUM	Mampu dan memahami serta mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan hukum di tingkat provinsi	Laporan		
METODE PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta menciptakan dan mengembangkan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan hukum tingkat provinsi (jenis metode penyuluhan hukum)	Naskah/ Laporan		
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN PENYULUHAN HUKUM	Mampu dan memahami serta menyelenggarakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluhan hukum tingkat provinsi	SK/ Sertifikat Narasumber		

III. LAMPIRAN

Lampirkan seluruh bukti pendukung.

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala informasi yang dituliskan dalam lembar form unjuk kerja ini adalah benar dan jujur apa adanya. Jika dikemudian hari terbukti informasi yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

....., 2018

Mengetahui,
Atasan Langsung,
(Nama Jabatan)

(Nama lengkap, NIP dan tanda tangan) (Nama lengkap, NIP dan tanda tangan)

- * **Form unjuk kerja beserta seluruh bukti pendukung disampaikan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui email *penyuluhhukum.bphn@gmail.com* paling lambat tanggal 14 Desember 2018;**
- * **Asli Form unjuk kerja beserta seluruh bukti pendukung dibawa pada saat pelaksanaan uji kompetensi pada tanggal 19 Desember 2018.**

